

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA:
PERSPEKTIF *UPPER ECHELON THEORY* DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Oleh
WINARSO TRI RAHAYU



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN INDONESIA: *UPPER ECHELON THEORY* PERSPECTIVE AND LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS

by
Winarso Tri Rahayu

This study aims to analyze the factors affecting the performance of local government in Indonesia through the perspective of *upper echelon theory* and characteristics of local government. As an independent variable, from the perspective of *upper echelon theory* using the characteristics of regional head with proxy tenure, education level and age. The characteristics of local government are measured by the ratio of independence level and level of dependency with the central government. Performance of local government as a dependent variable is measured by using the scores of the evaluation of local government performance (EKPPD) from Ministry of Home Affairs. After performing multiple regression analysis with *random effect model* (REM) method on panel data from 32 provinces in Indonesia during 2013 - 2015, the result show that the characteristics of government in the form of independence level have positive and significant influence, while the characteristics of regional head and level of dependence have no effect on performance of local government.

Keywords: *Upper Echelon Theory*, performance of local government, characteristics of regional head, characteristics of local government, level of independence, level of dependence

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA: PERSPEKTIF *UPPER ECHELON THEORY* DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH

Oleh
Winarso Tri Rahayu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia melalui perspektif *upper echelon theory* dan karakteristik pemerintah daerah. Sebagai variabel independen, dari perspektif *upper echelon theory* menggunakan karakteristik kepala daerah dengan proksi masa kerja, tingkat pendidikan dan umur. Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan rasio tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dari Kemendagri. Setelah melakukan analisis regresi dengan metode *random effect model (REM)* atas data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama tahun 2013 – 2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah berupa tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan karakteristik kepala daerah dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Upper Echelon Theory*, kinerja pemerintah daerah, karakteristik kepala daerah, karakteristik pemerintah daerah, tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA:
PERSPEKTIF *UPPER ECHELON THEORY* DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH**

Oleh

WINARSO TRI RAHAYU

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada
**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
INDONESIA: PERSPEKTIF UPPER
ECHELON THEORY DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH**

Nama Mahasiswa : **Winarso Tri Rahayu**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031142

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

Pigo Nauli, S.E., M.Sc.
NIP 19820623 200812 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

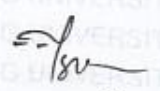
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 November 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perspektif *Upper Echelon Theory* dan Karakteristik Pemerintah Daerah” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, November 2017
Penulis,



Winarso Tri Rahayu
NPM 1511031142

RIWAYAT HIDUP



Winarso Tri Rahayu lahir di Magelang pada tanggal 27 Maret 1990 dari pasangan Bapak Sarwo Edi dan Ibu Maryati S.pd, merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyah Bustanul Athfal pada tahun 1996. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah Menoreh dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Salaman yang diselesaikan pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Taruna Nusantara Magelang hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai verifikator keuangan di Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project (STAR)* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan *Asian Development Bank (ADB)*.

PERSEMBAHAN

*Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan
rahmat yang diberikan,
Skripsi ini aku persembahkan untuk:*

Ibunda, Maryati, S.Pd.

Ayahanda, Sarwo Edi

Istriku tercinta, Widya Ayu Resty, S.E.

Almamaterku, Universitas Lampung

Institusiku, Badan Kebijakan Fiskal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

MOTTO

“Man Jadda Wa Jada (Barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatannya)”

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kalian...” (QS. Al-Hujurat: 13)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”(QS. Al Baqarah: 286)

“Do What You Need, Not What You Want”

“Talk Less Do More”

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perspektif *Upper Echelon Theory* dan Karakteristik Pemerintah Daerah” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini memiliki kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat adanya arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan guna penyempurnaan skripsi.
6. Ibu Agustina Awan, Bapak Noveriadi, Bapak Sulaiman, Bapak Yogi, Mbak Diana beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
7. Istriku bidariku tercinta, Widya Ayu Resty S.E., terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga penulis dapat selalu bersemangat dalam mewujudkan impian
8. Ibunda Maryati, S.Pd., Ayahanda, Sarwo Edi dan Mbak Erni Dwi Lestari, Adinda Lilis Ernawati dan Anisa Dian Utami, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan dalam membesarkan penulis.
9. Ibu mertua Hj. Beatty Ellysa dan Bapak mertua H. Anshori yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat Man Jadda Wajada, Iman Firmansyah, Ganjar Asdi Sudrajat, Alfian Prihanadi, Erwin Pandu Wardana, dan Eko Fauzi, terima kasih atas kehangatan, kebersamaan, dan penyemangat penulis dalam suka dan duka selama dua tahun di Lampung.
11. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch II Universitas Lampung dan keluarga besar Namaste Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama dua tahun ini.

12. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, November 2017

Penulis,

Winarso Tri Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Teori Keagenan	10
2.1.2 <i>Upper Echelon Theory</i>	11
2.1.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12
2.1.4 Karakteristik Kepala Daerah	18
2.1.5 Karakteristik Pemerintah Daerah	21

2.1.6	Penelitian Terdahulu	26
2.2	Rerangka Pemikiran	28
2.3	Hipotesis.....	29
2.3.1	Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja	29
2.1.2	Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja	31
III.	METODE PENELITIAN	34
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Definisi dan Operasional Variabel	34
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
3.5	Metode Analisis Data.....	37
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	37
3.5.2	Model Regresi Berganda.....	38
3.5.3	Uji Hipotesis.....	39
3.5.4	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	40
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Populasi dan Sampel	42
4.2	Statistik Deskriptif	43
4.2.1	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KIN)	43
4.2.2	Masa Kerja (<i>TENURE</i>).....	44
4.2.3	Tingkat Pendidikan (<i>EDUC</i>).....	44
4.2.4	Umur (<i>AGE</i>)	45
4.2.5	Tingkat Kemandirian (<i>MAND</i>).....	45
4.2.6	Tingkat Ketergantungan (<i>DEPEND</i>)	46
4.3	Pemilihan Model Regresi	46
4.3.1	Uji <i>Chow</i> (<i>Chow Test</i>).....	46
4.3.2	Uji <i>Hausman</i> (<i>Hausman Test</i>).....	47
4.3.3	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (<i>LM Test</i>)	48
4.4	Uji Asumsi Klasik	48
4.5	Analisis Hasil Regresi Data Panel	49
4.6	Pengujian Hipotesis.....	49

4.6.1 Uji Statistik F	49
4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.6.3 Uji Signifikansi-t (Uji-t).....	51
4.7 Pembahasan	52
4.7.1 Pengaruh Masa Kerja Kepala Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	52
4.7.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	53
4.7.3 Pengaruh Umur Kepala Daerah terhadap terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	53
4.7.4 Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	54
4.7.5 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	54
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Simpulan	56
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.3 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Kriteria Prestasi Skor EKPPD tahun 2013- 2015	4
Tabel 2.1	Pengelompokan Indeks EKPPD dan Status Prestasi	18
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 4.1	Proses Pengambilan Sampel	42
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Variabel	43
Tabel 4.3	Hasil Uji <i>Chow</i>	47
Tabel 4.4	Hasil Uji Hausman	47
Tabel 4.5	Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier (LM Test)</i>	48
Tabel 4.6	Hasil Regresi Berganda Model <i>Random Effect</i>	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Distribusi Kriteria Prestasi Skor EKPPD Provinsi di Indonesia Berdasarkan Area/Kepulauan Tahun 2013-2015	5
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Data Variabel Penelitian
2. *Output* Hasil Pemilihan Model Regresi
3. *Output* Hasil Regresi Berganda Model *Random Effect*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah secara efektif tanggal 1 Januari 2001 menandai dimulainya era desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik dkk., 2002). Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, akan tetapi desentralisasi diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata yaitu peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumber daya produktif (Mardiasmo, 2009). Adanya kebijakan desentralisasi menjadikan pemerintah daerah yang pada mulanya sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, menjadi daerah otonom yang mandiri. Kebijakan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah karena mereka diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang dimiliki melalui kebijakan-kebijakan yang mereka susun.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri atas sumber daya alam dan pajak daerah. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber-sumber pendanaan sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain guna membiayai belanja daerah dan jalannya roda pemerintahan. Keseluruhan pendapatan maupun belanja pemerintah daerah tersebut tertuang secara lengkap dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat oleh Pemda dan digunakan sebagai pedoman dalam mengelola pemerintahannya.

Selain dikelola secara baik dan dipergunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, keuangan daerah juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30-32, menyebutkan bahwa baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban APBN/APBD kepada DPR/DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Wujud pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut dipaparkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Bab II tentang pelaporan keuangan dan kinerja.

Dalam hal pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

menjelaskan bahwa adanya LKPD maka para pengguna laporan keuangan dapat melakukan komparasi antara kinerja keuangan dengan anggaran, menilai hasil operasional dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah, serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain LKPD, sarana akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah adalah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dipaparkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dengan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, informasi yang diungkapkan di dalam LPPD dimanfaatkan oleh pemerintah pusat sebagai sumber informasi utama penilaian kinerja pemerintah daerah dalam bentuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam bentuk skor secara nasional dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa LPPD digunakan sebagai informasi yang utama dalam proses EKPPD, dan difokuskan kepada informasi pencapaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil proses

EKPPD berupa peringkat secara nasional diurutkan berdasarkan skor kinerja. Skor kinerja ini merupakan kombinasi dari “Indeks Capaian Kinerja” dan “Indeks Kesesuaian Materi” setelah melalui proses pembobotan. Kriteria penilaian yang diputuskan terhadap skor kinerja tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) tingkatan prestasi. Penetapan peringkat, status, dan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi secara nasional setiap tahunnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi Berdasarkan Kriteria Prestasi Skor EKPPD tahun 2013 – 2015

No	Kriteria Prestasi	Skor Kinerja	2013	2014	2015
1	Sangat Tinggi	3,01 s.d. 4,00	1	1	5
2	Tinggi	2,01 s.d. 3,00	29	30	25
3	Sedang	1,01 s.d. 2,00	3	2	0
4	Rendah	0,00 s.d. 1,00	0	0	0
Total			33	33	30

Sumber: Hasil Skor EKPPD 2013-2015 dari Kepmendagri (data diolah)

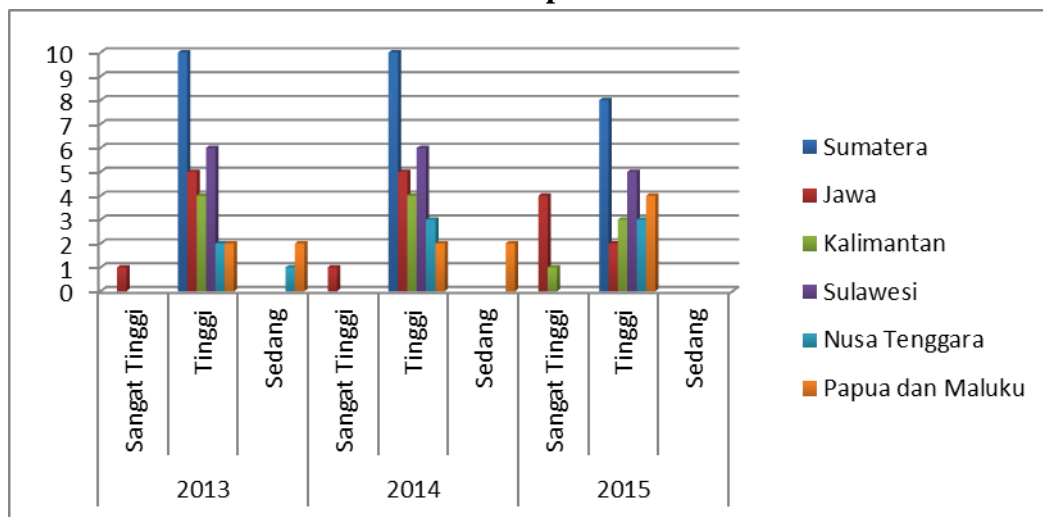
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2015 hanya ada 7 provinsi yang mendapatkan skor kinerja sangat tinggi. Sebagaimana dimuat dalam berita pada kompas.com edisi Selasa, 25 April 2017, dalam rangka menghadiri perayaan Hari Otonomi Daerah ke-21 di Alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyerahkan penghargaan kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota dengan kinerja terbaik secara nasional. Penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2015. Secara nasional provinsi dengan kinerja sangat tinggi didapat oleh provinsi Jawa Timur dengan

skor 3,1802. Selanjutnya disusul oleh Jawa Barat (3,1760), Kalimantan Timur (3,1469), DKI Jakarta (3,0560), dan Jawa Tengah (3,0539).

Dari sisi lain sebagian besar provinsi di Indonesia mendapatkan predikat skor kinerja tinggi yaitu antara 2,00 hingga 3,00. Sementara itu dari tahun ke tahun terdapat penurunan jumlah provinsi yang mendapatkan predikat skor kinerja sedang, yaitu 3 provinsi di tahun 2013, 2 provinsi di tahun 2014, dan tidak ada provinsi yang mendapatkan predikat skor sedang di tahun 2015. Tentunya hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah.

Namun sayangnya, beberapa provinsi yang mendapatkan predikat skor kinerja sangat tinggi dari tahun 2013 hingga 2015 didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Predikat skor kinerja tinggi didominasi oleh hampir sebagian area di Indonesia. Sedangkan kinerja sedang didapatkan provinsi di area Papua, Maluku serta Nusa Tenggara. Hal tersebut digambarkan secara lebih detail pada grafik berikut ini.

Gambar 1.1 Distribusi Kriteria Prestasi Skor EKPPD Provinsi di Indonesia Berdasarkan Area/Kepulauan Tahun 2013-2015



Sumber: Data Kepmendagri (diolah)

Hal tersebut tentunya menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti dengan mengaitkan kinerja pemerintah daerah dengan karakteristik pemerintah daerah. Kinerja yang digunakan dilihat biasanya dari aspek ekonomi maupun keuangan. Sedangkan karakteristik pemerintah daerah dapat diukur dari size daerah, tingkat kemandirian, belanja daerah dan tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Lin *et al.* (2010) melaksanakan penelitian mengenai kinerja ekonomi di China tahun 2005 dan 2006. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa pendapatan pemda, ekspor, impor, GDP, dan *income of family* berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pemda China. Hasil yang sedikit berbeda diperoleh Coll *et al.* (2006) yang meneliti pengaruh *tax, self-generate revenue, grant, leverage*, dan belanja daerah terhadap kinerja Pemda di Spanyol tahun 1995. Hanya *grant* dan *leverage* yang berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Selain dengan menggunakan kinerja ekonomi, beberapa penelitian di Indonesia menggunakan kinerja keuangan dan skor kinerja pemda. Kusuma dan Handayani (2017) dalam penelitiannya menyatakan kemakmuran dan belanja daerah berpengaruh positif, sedangkan ukuran pemda, tingkat ketergantungan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015. Penelitian Sedyaningsih dan Zaky (2015) terhadap skor EKPPD dengan objek seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan daerah dan temuan audit

berpengaruh negatif, sedangkan variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah tidak berpengaruh kinerja Pemda. Sari (2016) memperoleh hasil berbeda dalam penelitiannya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 57 kabupaten/kota di Pulau Sumatera tahun 2013. Variabel ukuran pemerintah daerah, PAD, dan dana perimbangan berpengaruh positif, sedangkan ukuran legislatif dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini menyertakan karakteristik kepala daerah sebagai variabel independen dengan mengaitkannya pada kinerja pemerintah daerah provinsi. Hal ini berdasarkan pada *upper echelon theory*, yang menyatakan bahwa variabel demografi seorang pemimpin di suatu organisasi/perusahaan seperti umur, masa kerja, tingkat pendidikan, dan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di Indonesia penelitian mengenai karakteristik kepala daerah belum banyak dilakukan. Pratiwi dan Aryani (2016) dalam penelitiannya terhadap 737 pemerintah kota/kabupaten di Indonesia tahun 2012 dan 2013, mengaitkan karakteristik pemerintah daerah, kepala daerah, tindak lanjut terhadap opini audit BPK. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan, kekayaan, belanja, masa kerja dan tindak lanjut berpengaruh positif, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif.

Berdasarkan uraian di atas, karena adanya *research gap* dan motivasi penulis untuk mengetahui lebih banyak mengenai pengaruh karakteristik kepala daerah dan karakteristik daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perspektif *Upper Echelon Theory* dan Karakteristik Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah masa kerja kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
- b. Apakah tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
- c. Apakah umur kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
- d. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?
- e. Apakah tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui adanya pengaruh masa kerja kepala daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui adanya pengaruh umur kepala daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

- e. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi yang dapat memberikan tambahan informasi secara teoritis dan bukti empiris mengenai pengaruh profil kepala daerah dan karakteristik daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah pusat diharapkan menjadi bahan masukan dalam menentukan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memaksimalkan potensi daerahnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Dalam sektor swasta, organisasi/perusahaan pada umumnya dikelola oleh orang-orang yang diberikan kuasa dan kepercayaan oleh *stakeholder*. Pihak *stakeholder* disebut juga sebagai *principal* sedangkan yang diberikan kuasa disebut *agent*. Sebagaimana pada organisasi/ perusahaan sektor swasta, pada penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penyerahan kekuasaan. Masyarakat dan pemerintah legislatif berlaku sebagai *principal* sedangkan pemerintah eksekutif daerah berlaku sebagai *agent*. Konsep keagenan inilah yang kita kenal sebagai *agency theory*.

Konsep mengenai *agency theory* mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling menyatakan bahwa hubungan keagenan ialah kontrak yang melibatkan satu atau lebih *principal* dengan *agent* untuk melakukan pekerjaan yang melibatkan sebagian pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan. Pelimpahan sebagian wewenang dari *principal* kepada *agent* akan mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal* karena *agent* mempunyai kepentingan sendiri. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing peran akhirnya akan

menyebabkan terjadinya konflik yang disebut sebagai *agency conflict* (Arifianti dkk., 2013). Asimetri informasi juga dapat terjadi dikarenakan adanya penyerahan wewenang dan kekuasaan. Asimetri tersebut timbul karena agen memperoleh akses informasi yang melebihi apa yang diperoleh pihak prinsipal. Hal ini dapat mendorong terjadinya penyimpangan yang dapat dilakukan oleh agen.

Implikasi dari teori keagenan ini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pihak pemerintah daerah selaku agen sudah selayaknya dapat mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, kepada pihak prinsipal yaitu masyarakat dan pemerintah pusat. Begitupun pemerintah pusat selaku prinsipal diharapkan dapat menyelenggarakan evaluasi atas kerja agen, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi, dengan indikator-indikator yang relevan sehingga diharapkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun makin meningkat.

2.1.2 *Upper Echelon Theory*

Hambrick dan Manson (1984) dalam penelitiannya menjelaskan *upper echelon theory* sebagai teori yang menjelaskan bahwa *outcomes* dari sebuah organisasi, yaitu pilihan strategis dan tingkat kinerja sebagian dapat diperkirakan melalui karakteristik latar belakang pemimpin. Nilai dan aspek psikologis dari pemimpin akan berperan besar menentukan *outcomes* organisasi, sehingga hal ini dapat diteliti secara empiris.

Teori ini hanya menggunakan data demografi dari pemimpin. Untuk melihat hubungan antara individu, organisasi, dan lingkungannya memerlukan penelitian dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosial, dan ekonomi. Kelemahan dari teori ini adalah pengesampingan beberapa pendekatan seperti

proses psikologi *top management*. Sedangkan kelebihan dari teori ini antara lain lebih mudah untuk memperkirakan karakteristik *top management* yang mempengaruhi *outcomes* organisasi. Para pembuat kebijakan juga dapat memanfaatkan dasar teori ini dalam memilih *top management* yang akan mengelola organisasi dengan melihat karakteristik demografi calon pemimpin seperti umur, pengalaman, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, atau karakteristik yang lain (Pratiwi dan Aryani, 2016).

Berdasarkan *upper echelon theory* dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pada kepala daerah seperti umur, masa kerja, latar belakang pendidikan, dan tingkat pendidikan dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

2.1.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sumber informasi utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Selain itu dapat menggunakan sumber informasi pelengkap yang berupa:

- a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan' APBD;
- b. informasi keuangan daerah;
- c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
- d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

- e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
- f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
- g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
- h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
- i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
- j. laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.
(PP No.6 Tahun 2008)

EKPPD ini dilaksanakan secara terukur, dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPKN (Kemendagri, Kemen PAN-RB, Kemenkeu, Kemenkum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan EKPPD adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
3. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada pemda yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD;

5. Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

EKPPD dilaksanakan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi (Manual EKPPD tahun 2016).

1. Indeks Capaian Kinerja (bobot 95%)

Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan

DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu:

- 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
- 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;

- 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;
- 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- 12) Pengelolaan potensi daerah; dan
- 13) Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setiap aspek dirinci ke dalam beberapa fokus (total 35 fokus), dan setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk pemerintahan provinsi total 39 IKK, Kabupaten 44 IKK dan kota 43 IKK. Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

- b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu:

- 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- 3) Penataan kelembagaan daerah;
- 4) Pengelolaan kepegawaian daerah;
- 5) Perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Pengelolaan keuangan daerah;
- 7) Pengelolaan barang milik daerah; dan
- 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, lalu dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 21 IKK. Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

c. Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja dibagi 2 yaitu :

1. Urusan Wajib, terdiri dari:

- a) Pemerintah Provinsi 62 Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- b) pemerintah Kabupaten 79 IKK.
- c) Pemerintah Kota 78 IKK.

2. Urusan Pilihan, terdiri dari:

- a) Pemerintah Provinsi 16 Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- b) Pemerintah Kabupaten 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- c) pemerintah Kota 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

d. Metode Penilaian Capaian Kinerja

Penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1 tersebut diatas dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Kriteria Umum, Penilaian yang dilakukan terhadap seluruh IKK:

- a) Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya ketepatan waktu penyerahan LPPD, Laporan Keuangan, Penetapan Perda APBD, ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan, dan seterusnya.
- b) Berdasarkan rata-rata nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi; angka kemiskinan, angka melek huruf, angka kelulusan, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah.
- c) Berdasarkan standar yang dirumuskan atau yang disepakati oleh tim teknis EPPD melalui metode normalisasi.

2. Kriteria khusus

- a) Kriteria khusus dilakukan terhadap penilaian SPM yang telah ditetapkan target nasionalnya.
- b) Sebagian IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang belum ada standarnya.

2. Indeks Kesesuaian Materi (bobot 5%)

Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah).

Kemudian setiap tahunnya Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan nilai/skor kinerja dari setiap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten. Kemendagri selanjutnya akan menetapkan peringkat dari hasil skor kinerja yang

disampaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Skor kinerja tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pengelompokan Indeks EKPPD dan Status Prestasi

No	Indeks EKPPD	Prestasi
1	$3,00 < \text{Skor} \leq 4,00$	Sangat Tinggi (ST)
2	$2,00 < \text{Skor} \leq 3,00$	Tinggi (T)
3	$1,00 < \text{Skor} \leq 2,00$	Sedang (S)
4	$0,00 \leq \text{Skor} \leq 1,00$	Rendah (R)

Sumber: Manual EKPPD Tahun 2016 Kemendagri (data diolah)

2.1.4 Karakteristik Kepala Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* definisi karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan Kepala Daerah sebagai sebutan untuk kepala pemerintahan daerah dan merupakan pimpinan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik kepala daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada seorang pemimpin daerah yang membedakan dengan pemimpin daerah lainnya.

Kedudukan seorang kepala daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah sangat penting karena seorang kepala daerah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan dan mengelola suatu daerah. Perspektif *upper echelon theory* memanfaatkan karakteristik individu dari pemimpin, data demografi, yang meliputi umur, latar belakang pendidikan, masa kerja lalu mengaitkannya dengan kinerja organisasi. Data demografi manajer potensial sebagai prediktor dari sasaran strategis dan tingkat kinerja organisasi (Hambrick dan Manson, 1984). Penelitian ini membahas pentingnya karakteristik Kepala Daerah (eksekutif) dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja dari penyelenggaraan pemerintah daerah merefleksikan hasil pilihan dari kebijakan yang diterapkan oleh seorang Kepala Daerah.

2.1.4.1 Pengalaman / Masa Kerja

Pengalaman kepala daerah adalah masa kerja seorang kepala daerah dalam memimpin suatu daerah (Pratiwi dan Aryani, 2016). Disamping itu pengalaman kerja juga bisa bermakna banyaknya pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dan lamanya mereka bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan tersebut. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman kerja seseorang sangat ditentukan oleh rentan waktu

lamanya seseorang menjalani pekerjaan tertentu. Dalam penelitian ini, masa kerja kepala daerah dilihat dari banyaknya tahun, dari semenjak pertama kali dilantik sampai dengan tahun pengamatan. Jika seorang kepala daerah dalam hal ini gubernur dilantik sebelum tanggal 1 Juli pada tahun bersangkutan, maka dihitung 1 (satu) tahun masa kerja.

2.1.4.2 Tingkat Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan dan pelatihan ialah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, lebih khususnya untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Teori *Human Capital* menyatakan peningkatan pendapatan seseorang dapat diperoleh salah satunya melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan kepala daerah merupakan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh seorang gubernur.

2.1.4.3 Umur

Hurlock (2004) mendefinisikan umur sebagai rentang kehidupan diukur dengan satuan tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Sedangkan bersumber dari wikipedia.com, umur atau usia diartikan sebagai satuan waktu yang mengukur

waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati.. Di Indonesia, kebijakan mengenai batas minimal usia seorang terkait dengan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa syarat usia minimal seorang menjadi calon bupati/walikota adalah 25 tahun, sedangkan usia calon gubernur adalah 30 tahun.

2.1.5 Karakteristik Pemerintah Daerah

Poerwadarminta (2006) menyatakan bahwa karakteristik adalah ciri-ciri khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khusus yang dimiliki oleh suatu daerah dan membedakannya dengan daerah lain.

2.1.5.1 Tingkat Kemandirian Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin dari kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana

dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 6, pendapatan asli daerah berasal dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang untuk memungut pajak daerah berada di tangan pemerintah daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikelompokkan dua jenis, yaitu:

a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari

- i. Pajak kendaraan bermotor
- ii. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
- iii. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- iv. Pajak air permukaan
- v. Pajak rokok

b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:

- i. Pajak hotel
- ii. Pajak restoran
- iii. Pajak hiburan

- iv. Pajak reklame
- v. Pajak penerangan jalan
- vi. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- vii. Pajak parkir
- viii. Pajak air tanah
- ix. Pajak sarang burung walet
- x. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- xi. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/ BUMN
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/ kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- a. hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b. jasa giro
- c. pendapatan bunga
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah

- f. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

2.1.5.2 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat di APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi untuk daerah yang memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebagaimana pernyataan Damayanty (2011) yang mengatakan dengan semakin besarnya PAD (*ceteris paribus*) maka kapasitas fiskal meningkat, celah fiskal

menurun dan berimbas pada menurunnya DAU. Sebaliknya, daerah dengan potensi fiskal yang kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penurunan DAU menunjukkan adanya peningkatan PAD yang berarti daerah semakin baik dalam mengelola kekayaan daerah yang dimiliki.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun) Judul/ Jurnal	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fontanella dan Rossieta (2014)/ Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia/ Makalah <i>Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok</i>	Independen: Tingkat Kemandirian daerah, Tingkat Ketergantungan dan Skor Kinerja Pemda Dependen: Opini Audit BPK	846 Kota/ Kabupaten di Indonesia tahun 2011-2012	Kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
2	Mulyani dan Wibowo (2017)/ Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan PAD terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2015/ <i>Kompartemen Vol</i>	Independen: BM, intergovernmental revenue, ukuran pemerintah daerah dan PAD Dependen: Kinerja Keuangan dengan proksi rasio efisiensi	105 Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2015	BM berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan intergovernmental revenue, ukuran pedad dan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

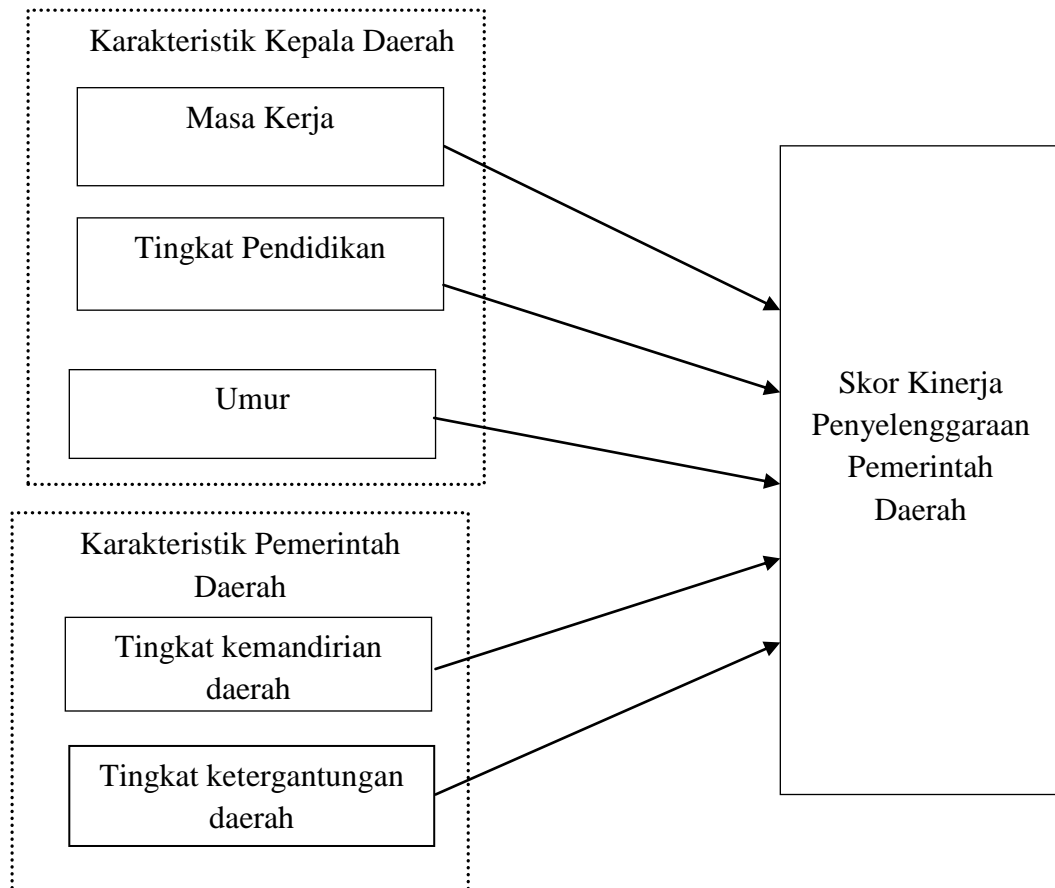
	XV No.1 Maret 2017			
3	Kusuma dan Handayani (2017)/ Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemda/ <i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</i> Vol.6 No.1 Januari 2017	Independen: Ukuran pemda, kemakmuran, tingkat ketergantungan, leverage dan belanja daerah Dependen: Kinerja keuangan dengan proksi rasio efisiensi	35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015	Kemakmuran dan belanja daerah berpengaruh positif sedangkan ukuran pemda, tingkat ketergantungan dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4	Sari (2016)/ Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/ <i>JOM Fekon</i> Vol.3 No.1 Februari 2016	Independen: Ukuran Pemda, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan ukuran legislatif Dependen: Kinerja keuangan	57 Kab/ Kota di Pulau Sumatera tahun 2013	- Ukuran Pemda, PAD, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif sedangkan ukuran legislatif dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
5	Pratiwi dan Aryani (2016)/ Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini/ <i>Jurnal Akuntansi</i> Vol.XX No.2 Mei 2016	Independen: tingkat ketergantungan, kekayaan, belanja, tindak lanjut dan masa kerja, ukuran pemda dan tingkat pendidikan Dependen: Opini Audit	737 Pemerintah Kab/Kota di Indonesia tahun 2012-2013	- Dengan uji regresi logistik yaitu binomial dan ordinal, tingkat ketergantungan, kekayaan, belanja, tindak lanjut dan masa kerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap opini audit - Ukuran pemda signifikan pada uji binomial dan tingkat pendidikan signifikan pada uji ordinal
6.	Mudhofar dan Tahar (2016)/ Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap	Independen: tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, efektivitas	671 kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2012-2013	-Kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda sedangkan

	Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja/ <i>Jurnal Akuntansi dan Investasi</i> Vol 17 No.2 Juli 2016	realisasi PAD dan skor kinerja Dependen: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah		tingkat ketergantungan dan efektivitas tidak berpengaruh.
7.	Sedyaningsih dan Zaky (2015) /Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012/ <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB</i>	Independen: Ukuran pemda, Tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah Dependen: Skor Kinerja Pemda	80 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2012	-Ukuran pemda, tingkat kekayaan dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda -Tingkat ketergantungan dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda

2.2 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba mengembangkan rerangka pemikiran penelitian yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Variabel Independen



Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

2.3.1 Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja

Pengalaman kepala daerah adalah masa kerja/ lamanya waktu seorang kepala daerah dalam memimpin suatu daerah. Pengalaman dalam bekerja tersebut diharapkan akan mempengaruhi seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan (Hambrick dan Manson, 1984; Seeba dkk., 2009). Pengalaman fungsional tim dari *top manager* tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap kinerja perusahaan (Fernandez dkk., 2014). Logikanya, seorang *manager*

yang berumur dan berpengalaman akan terbiasa dengan rutinitas tidak tertarik untuk mengubah/ berinovasi atas keadaan tersebut.

Akan tetapi, pada sektor publik masa kerja berhubungan positif dengan inovasi dan perubahan karena pada umumnya senioritas lebih dihormati dan semakin berpengalaman dalam melaksanakan administrasi publik sehingga berminat pada peningkatan kinerja. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Aryani (2016) yang meneliti 737 kabupaten/kota di Indonesia atas LKPD tahun 2012 dan 2013. Mereka mengaitkan hubungan antara karakteristik kepala daerah berupa latar belakang pendidikan, masa kerja dan umur terhadap opini audit yang diperoleh suatu instansi pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masa kerja kepala daerah kemungkinan mendapatkan opini yang lebih baik dari BPK. Artinya, semakin lama masa kerja dari suatu kepala daerah maka cenderung kinerjanya akan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H_1 : Masa kerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Individu dengan latar pendidikan formal mempunyai informasi yang lebih banyak dan kompleks, karena tingkat pendidikan individu mencerminkan pengetahuan dan *skill* dasar dari individu tersebut. Oleh karena itu, tingkat pendidikan sangat berpengaruh bagi seseorang. Seorang pemimpin dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan membantu dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Hambrick dan Manson 1984). Pratiwi dan Aryani (2016) dalam penelitiannya dengan *ordinal logistic regression* juga menemukan hal serupa, yaitu tingkat pendidikan kepala

daerah dapat mempengaruhi kemungkinan perolehan audit yang lebih baik (kinerja baik). Namun, Fernandez dkk. (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dari tim *top management* tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan, karena level pendidikan yang lebih tinggi cenderung memilih strategi yang sesuai dengan minat individu dari *top manager*. Kepala daerah yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan mempunyai informasi yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan (Pratiwi dan Aryani, 2016). Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Pandangan *upper echelon theory* menyatakan bahwa usia seorang pemimpin secara positif berpengaruh dengan kecenderungan untuk dapat melihat lebih banyak informasi secara lebih akurat, dan lebih lama dalam menimbangkan sebuah keputusan. Sedangkan pada pemimpin dengan usia muda cenderung akan mempunyai inovasi yang tinggi guna meningkatkan kinerja perusahaan (Hambrick dan Mason, 1984). Penelitian Seeba dkk. (2009) menyatakan umur tidak berpengaruh, tetapi berhubungan negatif dengan kinerja perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Pratiwi dan Aryani (2016), yang mengungkapkan bahwa umur kepala daerah memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan opini yang lebih buruk dari BPK (kinerja tidak maksimal). Sehingga berdasarkan uraian diatas maka terbentuk hipotesis ketigsa sebagai berikut.

H₃ : Umur kepala daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

2.3.2 Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja

Salah satu tolok ukur kemandirian dari suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Hartyanto (2014) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah yang ditandai dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mumpuni. PAD mempunyai peran yang penting dalam keuangan daerah karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan dan belanja pemerintah daerah. Semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan suatu daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya akan berimbas kepada kinerja pemerintahan daerah yang semakin baik pula.

Paparan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossietta (2014), Mudhofar dan Tahar (2016), dan Sari (2016). Penelitian mereka menyatakan bahwa tingkat kemandirian yang diproksikan dengan PAD berpengaruh secara positif baik terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut.

H₄ : Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Damayanty (2011) menyatakan dengan semakin besarnya PAD (*ceteris paribus*) maka kapasitas fiskal meningkat, celah fiskal menurun dan berimbas pada menurunnya DAU. Sedangkan daerah dengan potensi fiskal yang kecil tetapi

kebutuhan fiskalnya besar akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penurunan DAU menunjukkan adanya peningkatan PAD yang berarti daerah semakin baik dalam mengelola kekayaan daerah yang dimiliki. Sebaliknya, dengan semakin besarnya DAU yang diperoleh suatu daerah mengindikasikan ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah pusat. Dalam arti lain, pemda tersebut belum mampu memaksimalkan potensi daerahnya sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja yang dicapai belum optimal.

Hal tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian Fontanella dan Rossieta (2014), Mudhofar dan Tahar (2016), serta penelitian Kusuma dan Handayani (2017). Hasil penelitiannya diperoleh bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis kelima dari penelitian ini adalah:

H₅: Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian penjelasan atau yang sering disebut sebagai *explanatory research*. Hermawan (2009) mengartikan *explanatory research* sebagai penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Jadi *explanatory research* dapat dikatakan sebagai penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan analisis faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di Indonesia dari perspektif *upper echelon theory* dan karakteristik pemerintah daerah.

3.2 Definisi dan Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang diteliti yang bersifat saling mempengaruhi. Menurut Wijaya (2013), “variabel adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membedakan atau merubah nilai, sebagai sinonim dari konstruk yang dinyatakan dengan nilai atau angka”. Sedangkan variabel penelitian menurut Sugiyono (2013) merupakan suatu atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu:

1. Variabel bebas/ independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik kepala daerah yang diprosikan dalam masa kerja, tingkat pendidikan dan umur, serta karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan dalam tingkat kemandirian pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat.

2. Variabel terikat/ dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah skor kinerja Pemda Provinsi secara nasional yang berasal dari Kepmendagri selama tahun 2013-2015. *Range* skornya yaitu skor 0-1,00 mendapat kategori prestasi rendah, skor 1,01-2,00 = prestasi sedang, skor 2,01-3,00 = prestasi tinggi, dan skor 3,01-4,00 = prestasi sangat tinggi.

Secara lebih lengkap, definisi masing-masing variabel dalam penelitian ini akan disajikan pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Skala
Skor Kinerja (KIN)	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	rasio
Masa kerja/Pengalaman (TENURE)	Lamanya waktu seorang kepala daerah menjabat sampai dengan tahun LKPD berakhir. Satuannya tahun.	rasio
Tingkat Pendidikan	Jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh seorang kepala daerah/gubernur. (Sebaa dkk.,	nominal

(EDUC)	2009) membuat kategori dalam penelitiannya. Disimbolkan 0 (nol) untuk tingkat pendidikan TNI/POLRI atau yang lainnya, 1 (satu) untuk tingkat pendidikan S1, 2 (dua) untuk tingkat pendidikan S2 dan S3	
Umur (AGE)	Umur biologis kepala daerah sampai dengan tahun LKPD bersangkutan. Satuannya tahun.	rasio
Tingkat kemandirian (MAND)	$\text{MAND} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}}$	rasio
Tingkat Ketergantungan Daerah (DEPEND)	$\text{DEPEND} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}}$	rasio

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menurut Wijaya (2013), “Populasi adalah seluruh kumpulan elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan”. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun yang menjadi sampel adalah seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai kriteria yang dipilih penulis dan harus dipenuhi oleh sampel penelitian yaitu:

- a. Provinsi di Indonesia yang mempublikasikan LKPD tahun 2013 sampai 2015 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Provinsi yang mempunyai skor kinerja penyelenggaraan pemda hasil publikasi dari Kemendagri tahun 2013 hingga 2015.

- c. Provinsi yang memiliki data secara lengkap tentang profil gubernur yang menjabat dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2015.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel. Menurut realisasi APBD yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi antara tahun 2013 hingga 2015, yang bersumber dari situs BPK RI www.bpk.go.id dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id, data berupa skor kinerja penyelenggaraan pemerintah dari situs kemendagri www.kemendagri.go.id, dan profil kepala daerah dari situs Direktorat Jenderal Otonomi daerah otda.kemendagri.go.id. Data kemudian diolah oleh peneliti dengan bantuan *Microsoft Excell* lalu dilanjutkan dengan aplikasi *Eviews*.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Model persamaan regresi diatas terlebih dahulu melalui pengujian-pengujian berikut guna memenuhi asumsi klasik:

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov.

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.1.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independent. Jika variable independent saling berkorelasi, maka variablevariabel ini tidak ortogonal. *Variabel orthogonal* adalah variable independent yang nilai korelasi antar sesama *variable independent* sama dengan nol (Ghozali, 2016).

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.

3.5.2 Model Regresi Berganda

Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda (*multiple regression*). Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk

masing-masing variabel independen. Koefisien ini didapatkan dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Metode regresi tersebut dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan di bawah ini yaitu dalam bentuk persamaan-persamaan. Adapun bentuk persamaan dimaksud yang digunakan dalam pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan diatas adalah:

$$KIN_{it} = a + b_1 TENURE_{it} + b_2 EDUC_{it} + b_3 AGE_{it} + b_4 MAND_{it} + b_5 DEPEND_{it} + e$$

Dimana:

KIN_{it} : Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

$TENURE$: Masa Kerja/Pengalaman

$EDUC$: Tingkat Pendidikan

AGE : Umur

$MAND$: Tingkat kemandirian

$DEPEND$: Tingkat ketergantungan

i : *Cross-section*

t : *Time series*

a : Intersep/konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 : Koefisien regresi

e : *Error term*

3.5.3 Uji Hipotesis

Menurut Nachrowi (2006), uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Uji-F

Uji-F dilakukan guna menguji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu Uji –F juga dapat digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F dilaksanakan dengan melihat nilai (F-statistik). Apabila nilai (F-statistik) lebih kecil dari lima persen ($F\text{-stat} < 5\%$) maka seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji-t

Jika Uji-F diperuntukkan guna menguji koefisien regresi secara bersamaan, maka Uji-t dipakai menguji koefisien regresi secara individu/parsial. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Apabila probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ (*probability value < 5%*), maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*) dinotasikan dengan R^2 adalah suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diformulasikan. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) bernilai antara nol sampai dengan satu, dan mencerminkan seberapa besar variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Jika nilai R^2 sama

dengan 0, artinya variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Lain halnya jika nilai Koefisien Determinasi sama dengan 1 ($R^2 = 1$), artinya variabel-variabel bebasnya dapat menerangkan secara keseluruhan variabel terikatnya. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh semakin besarnya besarnya nilai Koefisien Determinasi (R^2).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di Indonesia dari perspektif *upper echelon theory* dan karakteristik pemerintah daerah dengan tahun pengamatan dari tahun 2013 sampai 2015. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Masa kerja kepala daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.
- b. Tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.
- c. Umur kepala daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.
- d. Tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.

- e. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan skor kinerja pemerintah daerah dari Kemendagri di tahun 2013 hingga tahun 2015, dan mengambil sampel pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
- b. Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia sebesar 16,31%. Dengan demikian, sisanya diterangkan oleh variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam penelitian
- c. Dalam kurun waktu pengamatan yaitu antara tahun 2013 hingga tahun 2015, terjadi pergantian kepala daerah di beberapa objek penelitian sehingga memungkinkan terjadi bias dalam penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian berupa simpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan skor kinerja yang terbaru yaitu tahun 2016 sehingga dapat memberikan hasil yang lebih *up to date* terkait kinerja penyelenggaraan pemerintah di

Indonesia. Selain itu, penggunaan sampel yang lebih banyak diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

- b. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel karakteristik kepala daerah seperti latar belakang pendidikan (misalnya ekonomi, akuntansi, bisnis dan lain-lain) dan pengawasan legislatif, serta karakteristik daerah seperti ukuran daerah, luas daerah, tingkat kemakmuran, kelemahan SPI dan *leverage*. Selain itu diharapkan menambah literatur pendukung yang kuat tentang proksi-proksi tersebut.
- c. Bagi pemerintah daerah provinsi, kota maupun kabupaten yang masih mendapatkan skor kinerja dengan kategori rendah (0,00-1,00), sedang (2,01-3,00), dan tinggi (2,01-3,00) diharapkan supaya dapat meningkatkan kinerja sehingga diharapkan di tahun yang akan datang dapat mencapai kategori sangat tinggi (skor 3,01- 4,00).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianti, Hemin, Payamta dan Sutaryo. (2013). "Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Indonesia)". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*.
- Coll, Maria Teresa Balaguer., Prior, Diego., Ausina, Emili Tortosa. (2006). On the determinants of local government performance: a two stage nonparametric approach. *European Economic review* 2007, 425-451.
- Damayanty, Sofia Arie. 2011. *Menelisik Kemampuan Keuangan Daerah. Dalam Risiko Fiskal Daerah*. Jakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Fernandez, Maria Carmen Diaz, Maria Rosario Gonzalez-Rodriguez, dan Marek Pawlak. (2014). "Top Management Teams Intellectual Capital and Firm Performance". *Industrial Management & Data Systems Vol 114*. 365-386.
- Fontanella, Amy, dan Hilda Rossieta. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. Boston: McGraw-Hill.
- Hambrick, D. C., & Manson, P. A. (1984). Upper Echelon : The Organization as A Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*, 193-206.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, Asep. 2009. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hartyanto, Adi. (2014). Studi Tentang Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- [Http://nasional.kompas.com/read/2017/04/25/12173071/jakarta.jadi.provinsi.berkinerja.terbaik.djarot.disambut.paling.meriah](http://nasional.kompas.com/read/2017/04/25/12173071/jakarta.jadi.provinsi.berkinerja.terbaik.djarot.disambut.paling.meriah) (diakses tanggal 1 Oktober 2017).
- Hurlock, E. (2004). *Psikologi Perkembangan* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W. H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.

- Kusuma, Aulia Rizka, dan Nur Handayani. (2017)/. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemda. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.6 No.1
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., & Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying Integrated DEA/AHP to Evaluate The Economic Performance of Local Government in China. *European Journal of Operational Research* 209, 129-140.
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mudhofar, Kurniatul, dan Afrizal Tahar. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol 17 No.2.
- Mulyani, Sri, dan Hardiyanto Wibowo. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergoverntal Revenue* dan PAD terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2015. *Jurnal Kompartemen* Vol. XV No.1.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Prosiding *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi. 2006. *Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: RinekaCipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Pratiwi, Ristu dan Y Anni Aryani. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi* Vol. XX No.2 Hal. 167-189.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- , 2003. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , 2003. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- , 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- , 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- , 2015. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- . 2011. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- . 2012. Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . 2009. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- . 2014. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- . 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- . 2006. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- . 2007. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- . 2008. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- . 2010. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, Indah Puspa. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/ *JOM Fekon* Vol.3 No.1
- Sebaa, A., J. Wallace, dan N. Cornelius. (2009). Managerial Characteristics, Strategy and Performance in Local Government. *Measuring Business Excellence* 13(4): 12-21.
- Sedyaningsih, Peni dan Achmad Zaky. (2015). Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Sidik, Mahfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum- Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhardjanto, D. dan Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8(1)*: 30-42.
- Sutrisno. 1984. *Konsep Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Waluyo, Joko. (2004). Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pedapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9 No.1*, Hal. 1-20.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.